

DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMISKINAN DI INDONESIA (STUDI KASUS: INDONESIA BAGIAN TIMUR)

Ichsan Maulana^{1*} dan Raja Masbar²

- 1) Jurusan Ekonomi Pemangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala
Email: ichsanmaulana.icm@gmail.com
- 2) Jurusan Ekonomi Pemangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala
Email: raja.masbar@unsyiah.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of the decentralization instruments; General Allocation Fund and Special Allocation Fund –by using Regional Gross Domestic Product as the control variable on poverty in eastern region of Indonesia focus on several provinces namely Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara and Nusa Tenggara Timur. Panel data (pooled data) with 5 provinces for 2008-2013 is used in this research and using fixed effect model the data is analyzed. The result shows that Regional Gross Domestic Product has significant positive effect on poverty. Moreover, decentralization instruments; Special Allocation Fund has significant positive effect on poverty. However, General Allocation Fund has not significant negative effect on poverty. The government is expected to intensify General Allocation Fund usage for capital expenditure on the sectors that stimulate the economy.

Keywords: *Fiscal Decentralization, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Poverty, Fixed Effect Model.*

Abstrak

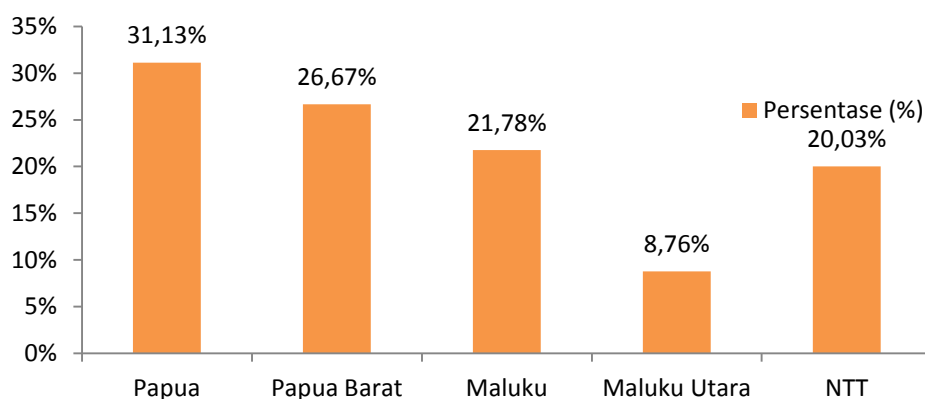
Penelitian ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana pengaruh desentralisasi fiskal melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), -dengan menggunakan Produk Domesik Regional Bruto (PDRB) sebagai variable kontrol, terhadap kemiskinan di Indonesia bagian timur; Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Data yang digunakan adalah data panel (*pooled data*) 5 provinsi tahun 2008-2013. Model yang digunakan ialah model panel dengan metode analisis *fixed effect model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB sebagai variabel kontrol berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya, instrumen desentralisasi fiskal DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Adapun DAU mempunyai pengaruh negatif namun tidak signifikan. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi DAU untuk belanja modal pada sektor yang dapat menstimulus perekonomian, hingga pada gilirannya dapat membantu dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Kemiskinan, Fixed Effect Model.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang besar, memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau, 34 provinsi, dengan pembagian wilayah: Indonesia bagian barat, bagian tengah, hingga bagian timur. Dengan luas yang begitu besar tentunya mempunyai ragam persoalan pelik dan membutuhkan pengelolaan yang tepat. Adapun salah satu permasalahan besar dari waktu ke waktu di Indonesia ialah persoalan kemiskinan. Luas wilayah yang besar menyebabkan pengelolaan yang tidak mudah. Kerap kali pembagian tidak merata serta ketimpangan antar wilayah sangat terasa. Akibatnya lahir kecemburuan antar wilayah di Indonesia, bagaimana mungkin wilayah tengah dan barat cenderung pembangunannya jauh lebih baik dan mendapatkan prioritas utama dibandingkan wilayah Indonesia bagian timur.

Persoalan pembagian yang cenderung tidak merata di Indonesia terlihat jelas di belahan timur wilayah Indonesia. Dimana ragam masalah terus terjadi seakan tak kunjung mendapatkan perhatian dan prioritas yang nyata. Seyogyanya, pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah atau daerah yang ada di Indonesia. Tanpa terkecuali bagian timur wilayah Indonesia. Salah satu indikator yang dapat menjadi patokan keberhasilan suatu pembangunan ekonomi yang berimbang pada peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kemiskinan. Salah satu kebijakan yang dapat menanggulangi kemiskinan ialah melalui desentralisasi fiskal, dimana dua instrumen daripada desentralisasi fiskal; Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan dapat menstimulus perekonomian yang berdampak pada meningkatnya PDRB serta dapat menurunkan kemiskinan di Indonesia bagian timur.



Sumber: BPS (Data diolah)

Gambar 1. Persentase Kemiskinan Tahun 2013

Persoalan kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan pokok dan klasik yang dihadapi bangsa Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Namun, Persentase penduduk miskin paling banyak berada di wilayah Indonesia Timur, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT. Seperti dapat dilihat pada Gambar 1 kemiskinan di daerah tersebut masih teratas selama beberapa tahun terakhir, dengan persentase penduduk miskin Papua pada periode 2013 mencapai (31,13 persen), diikuti oleh Papua Barat (26,67 persen), Maluku (21,78 persen), Maluku Utara (8,76 persen) dan Nusa Tenggara Timur (20,03 persen).

Kebijakan sistem desentralisasi fiskal melalui DAU dan DAK memungkinkan daerah untuk dapat mengupayakan peningkatan kinerja ekonomi dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Melalui pengenalan potensi baik ekonomi maupun non ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, nantinya akan

memberikan konsekuensi yang positif terhadap pembangunan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi akan dapat terus berkembang dan meningkat. Dengan begitu pendapatan masyarakat akan meningkat, maka, dampaknya adalah kemiskinan di daerah tersebut akan berkurang. Namun, di pihak lain dapat terjadi sebaliknya dimana kebijakan tersebut malah dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin.

TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi Fiskal

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Irena Szarowská di Uni Eropa dengan judul *Impact Of Fiscal Decentralisation On Economic Development In The European Union* diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengeluaran desentralisasi berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 yang dilakukan oleh Andrés Rodríguez-Pose dan Anne Krøijer di Eropa dengan judul penelitian *Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe* diperoleh hasil bahwa dua dari tiga indikator desentralisasi memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Indikator tersebut adalah pengeluaran pemerintah dan pajak.

Desentralisasi sebagai suatu strategi ekonomi akan berjalan jika faktor kelembagaannya diurus dengan baik. Artinya, desentralisasi dapat dipahami sebagai (*rules of the game*) pemerintah lokal untuk menangani perekonomian daerah. Perspektif ini berhasil tidaknya desentralisasi amat tergantung dari kelembagaan makro dan mikro yang terbentuk. Jika tujuan makro ekonomi dari desentralisasi diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di daerah, maka pemerintah lokal harus menyusun kelembagaan ekonomi yang efisien untuk menjaring investasi. Sementara itu, apabila tujuan dari desentralisasi difokuskan kepada hubungan antar pelaku ekonomi, maka pemerintah lokal konsentrasi kepada kebijakan yang membatasi proses eksploitasi satu pelaku ekonomi kepada pelaku ekonomi lainnya (Yustika, 2006:95).

Apabila desentralisasi fiskal mengutamakan pengeluaran publik, maka desentralisasi akan berdampak langsung terhadap PDRB, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pembelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan daerahnya sendiri (Vasquez dalam Yustika, 2006).

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) secara definisi merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil (Brodjonegoro, dkk 2002).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN, dialokasikan/ditransfer kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sehingga dapat membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan agar DAK ini diatur lebih lanjut

dalam bentuk PP. Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Bank Indonesia mendefinisikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Kemiskinan

Konsep tentang kemiskinan dari Bappenas adalah melihat kemiskinan dari kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar menurut Bappenas terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dalam melihat hak-hak ini Bappenas menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan kebutuhan dasar, pendekatan pendapatan, pendekatan kemampuan dasar dan pendekatan objektif and subjektif.

METODE PENELITIAN

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data runtun waktu (*time series*) yang berupa data tahunan dari tahun 2008-2013. Data Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Kemiskinan berasal dari World Bank (Publikasi INDODAPOER). Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan publikasi data lainnya yang relevan dan berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa model data panel dengan tiga macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan kuadrat terkecil (*pooled least square*), pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Kemudian, dengan menggunakan variabel PDRB sebagai variabel kontrol, Teknik tersebut digunakan untuk mengestimasi persamaan berikut:

$$KMS_t = \beta_0 + \beta_1 DAU_{i-t} + \beta_2 DAK_{i-t} + \beta_3 PDRB_{i-t} + \varepsilon$$

Keterangan:

- KMS_{i-t} = Jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan pada provinsi ke-i pada tahun ke-t (satuan jiwa);

- DAU_{i-t} = Dana alokasi umum provinsi ke-i pada tahun ke-t (satuan rupiah);
- DAK_{i-t} = Dana alokasi khusus provinsi ke-i pada tahun ke-t (satuan rupiah);
- $PDRB_{i-t}$ = Jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian provinsi ke-i pada tahun ke-t (satuan rupiah)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini masing-masing memiliki jumlah observasi 30 ($n=30$). Deskripsi statistik dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini secara ringkas dapat dilihat pada Tabel II.

Tabel 2. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

Provinsi	Tahun	Kemiskinan	DAU	DAK	PDRB
Maluku	2008	388900	556236	36612	6269000
Maluku	2009	369200	578164	68267	7070000
Maluku	2010	378600	607572	32753	8085000
Maluku	2011	360320	703994	44658	9594886
Maluku	2012	338900	829491	38063	24661751
Maluku	2013	315200	897657	53425	27834442
Maluku Utara	2008	107800	451481	36452	3862000
Maluku Utara	2009	99200	458512	59290	4691000
Maluku Utara	2010	91100	479727	26386	5387000
Maluku Utara	2011	97310	540390	51234	6038674
Maluku Utara	2012	88300	703159	37858	19340464
Maluku Utara	2013	85600	772591	69688	21439485
NTT	2008	1105800	616602	42576	21656000
NTT	2009	962700	616602	52759	24179000
NTT	2010	1014100	674636	30107	27711000
NTT	2011	1012900	752057	41692	31221528
NTT	2012	1012500	940647	57089	54893145
NTT	2013	1006900	77823	1003992	61325255
Papua	2008	709200	876295	750000	61516000
Papua	2009	709400	1058228	74663	77729000
Papua	2010	761600	1058228	750550	89451000
Papua	2011	944790	1148741	721156	76559101
Papua	2012	976400	1569782	106191	112812561
Papua	2013	960600	1889268	133897	122857171
Papua Barat	2008	237300	578084	22000	13975000
Papua Barat	2009	227500	595000	68580	17214000
Papua Barat	2010	256300	605900	21708	22527000
Papua Barat	2011	249840	700445	40539	36170460
Papua Barat	2012	223200	901398	38633	47421091
Papua Barat	2013	226200	1064873	64931	52997659

Hasil Estimasi

Tabel 3. Hasil Estimasi dengan Model *Pooled Least Square*

Variabel Bebas	Notasi	Koefisien	t-Statistik	Prob
Konstanta	C	2009.034	2550.253*	0.0000
Dana Alokasi Umum	DAU	-8.94E-07	-0.901889	0.3754
Dana Alokasi Khusus	DAK	2.28E-06	2.356105**	0.0263
Produk Domestik Regional Bruto	PDRB	9.96E-07	0.772704	0.4467
Jumlah Observasi				30
R-Squared				0.180990
F-Statistik				1.915213
Prob (F-Statistik)				0.151901
Durbin-Watson Stat				0.323758

Sumber : Output Eviews (9.0)

Keterangan :

Variabel terikat : tingkat kemiskinan (KMS)

*= signifikan pada $\alpha = 0,01$

** = signifikan pada $\alpha = 0,05$

Dalam *pooled least square* diasumsikan setiap provinsi memiliki perilaku yang sama, padahal setiap provinsi berkemungkinan memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam fungsi tingkat kemiskinannya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam bentuk perbedaan intersep. Salah satu caranya adalah dengan menambah variabel *dummy* dalam model *fixed effect* seperti yang disajikan secara ringkas pada Tabel III berikut:

Tabel 4. Hasil Estimasi dengan Model *Fixed Effect*

Variabel Bebas	Notasi	Koefisien	t-Statistik	Prob
Konstanta	C	2004.593	1082.566*	0.0000
Dana Alokasi Umum	DAU	-3.33E-06	-0.879625	0.3886
Dana Alokasi Khusus	DAK	8.55E-06	7.005622*	0.0000
Produk Domestik Regional Bruto	PDRB	6.32E-06	5.307031*	0.0000
Jumlah Observasi				30
R-Squared				0.709761
F-Statistik				7.685647
Prob (F-Statistik)				0.000099
Durbin-Watson Stat				1.974542

Sumber : Output Eviews (9.0)

Keterangan: variabel terikat : tingkat kemiskinan (KMS), *= signifikan pada $\alpha = 0,01$

Dengan memasukkan variabel *dummy* ke dalam model *fixed effect* berpotensi menimbulkan masalah baru yaitu berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*). Maka diperlukan pertimbangan dalam memilih model antara *pooled least square* dan *fixed effect* dengan menggunakan pengujian F-Test (*Chow Test*). Hasil pengujian menggunakan software Eviews 9.0 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil F-Test (*Chow Test*)

Effect Test	Statistik	d.f	Prob.
Cross-section F	10.020146	4.22	0.0001
Cross-section Chi-Square	31.121724	4	0.0000

Sumber: Output Eviews 9.0

Hasil tersebut menunjukkan baik *F-Test* maupun *Chi-Square* signifikan di mana *p-value* < 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka model yang lebih sesuai adalah *fixed effect*. Setelah dilakukan pengujian *F Test (Chow Test)*, maka selanjutnya menggunakan model *random effect*. Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan model *fixed effect* yang menggunakan *dummy variable*, *random effect* menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar daerah. Hasil regresi dengan *random effect* dapat dilihat pada Tabel V.

Tabel 6. Hasil Estimasi dengan Model *Random Effect*

Variabel Bebas	Notasi	Koefisien	t-Statistik	Prob
Konstanta	C	2009.034	2550.253*	0.0000
Dana Alokasi Umum	DAU	-8.94E-07	-0.901889	0.3754
Dana Alokasi Khusus	DAK	2.28E-06	2.356105**	0.0263
Produk Domestik Regional Bruto	PDRB	9.96E-07	0.772704	0.4467
Jumlah Observasi				30
R-Squared				0.180990
F-Statistik				1.915213
Prob (F-Statistik)				0.151901
Durbin-Watson Stat				0.3237
				58

Sumber : Output Eviews (9.0)

Keterangan :

Variabel terikat : tingkat kemiskinan (KMS), *= signifikan pada $\alpha = 0,01$ dan **= signifikan pada $\alpha = 0,05$

Hausman Test dilakukan untuk menentukan pilihan model data panel yang lebih tepat antara *fixed effect* dan *random effect*. Hasil pengujian ditampilkan pada Tabel VI. Hasil pengujian diperoleh *chi-square* 40.0805 dan *p-value* 0.0000 atau lebih kecil dari 5% sehingga menolak H_0 dan menerima H_1 , maka model yang lebih tepat adalah *fixed effect* dibandingkan dengan *random effect*.

Tabel 7. Hasil *Hausman Test*

Test Summary	Chi-Sq Statistik	Chi-Sq d.f	Prob.
Cross-section random	40.080583	3	0.0000

Sumber : Output Eviews 9.0

Pembahasan Hasil Estimasi

Hasil estimasi dengan model *fixed effect* diperoleh koefisien determinasi atau *Adjusted R-squared* 0.617412 yang berarti 61,74 persen variasi tingkat kemiskinan (KMS) dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variasi jumlah dana alokasi umum (DAU), jumlah dana alokasi khusus (DAK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan sisanya 38,26 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang belum dimasukkan dalam persamaan.

Nilai konstanta (C) diperoleh sebesar 2004,593 yang berarti tanpa adanya variabel-variabel bebas tersebut di atas, maka tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat adalah sebesar 2004,593. Sedangkan nilai konstanta (C) untuk masing-masing provinsi dapat dilihat pada Tabel IV, di mana Provinsi NTT mempunyai konstanta (intersep) tertinggi yaitu 27,608. Provinsi NTT merupakan Provinsi dengan tingkat kemiskinan rata-rata tertinggi karena Provinsi ini memiliki jumlah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta jumlah pendapatan domestik regional bruto yang rendah dibandingkan Provinsi lainnya.

Nilai *F-statistic* diperoleh sebesar 7.685647 atau lebih besar dari *F-table* (7,107,001). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini secara keseluruhan adalah signifikan dengan *p-value* < 0,01. Dengan demikian, model tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh

jumlah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan. Pengaruh masing-masing variabel tidak terikat terhadap variabel terikat dapat dilihat dengan membandingkan nilai *t-statistic* terhadap *t-table* atau melihat *p-value*. Dari hasil estimasi diperoleh koefisien variabel dana alokasi khusus dan produk domestik regional bruto berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan *p-value* < 0,01. Sedangkan variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Hasil estimasi dengan model *fixed effect* menunjukkan bahwa jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
2. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel DAK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan *p-value* < 0,01 (1 persen). Nilai koefisien yang diperoleh adalah sebesar 8,55 yang mempunyai arti bahwa kenaikan 1 persen jumlah DAK akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 8,55 persen.
3. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel DAK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan *p-value* < 0,01 (1 persen). Nilai koefisien yang diperoleh adalah sebesar 8,55 yang mempunyai arti bahwa kenaikan 1 persen jumlah DAK akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 8,55 persen.

Saran

1. Pemerintah daerah sebaiknya mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam belanja daerah lebih proporsional mengarah kepada program dan kegiatan yang mendukung penanggulangan kemiskinan. Serta terus mengoptimalkan potensi daerah agar dapat menggenjot Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Bagi penulis yang ingin melanjutkan penelitian ini dapat menambahkan variabel maupun daerah lainnya, agar hasil yang didapat dalam penelitian ini lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkatiri, J. B. (2005). *Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Aulia. (2014). *Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: ISSN 2502-2725.
- Bank, W. (2001). *Decentralization and Governance: Does Decentralization Improve Public Service Delivery*. Waashington: World Bank.
- Brodjonegoro, B. d. (2001). *An Analysis of Indonesia's Transfer System: Recent Performance and Future Prospects*. Georgia: Georgia State University.
- Mangkoesebroto, G. (1993). *Ekonomi Publik, Edisi-III*. Yogyakarta: BPFE.
- Rodríguez-Pose, A. and Krøijer, A. (2009), Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe. *Growth and Change*, 40: 387–417

- Siregar, S. d. (2010). *Analisis Determinan Kemiskinan Sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: E-Jurnal Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Sumedi. (2005). *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Kesenjangan Antar Daerah dan Kinerja Perekonomian Nasional dan Daerah*. Bogor: Sumedi. 2005. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Kesenjangan AInstitut Pertanian Bogor.
- Szarowská, Irena. (2015). Impact of Fiscal Decentralisation on Economic Development in The European Union, *Acta academica karviniensia*, No.2 2015
- Wirathi, S. d. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol.2, No.3.
- Yustika, A. (2006). *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Malang: Bayumedia